

2024

LAPORAN
KEUANGAN
BALAI
PENGELOLAAN
INFORMASI
SUMBER DAYA
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN

Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2024

JALAN SEACORM KM.2, KEC. JEMBRANA, KAB. JEMBRANA,
BALI 82251
TELEPON (0365) 44269



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jembrana, 20 Januari 2025

Kepala,



Dr. Teja Arjef Wibawa, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	44
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
F. Pengungkapan Penting Lainnya	53
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jembrana, 20 Januari 2025

Kepala,



Dr. Teja Arief Wibawa, M.Si

Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara Per 31 Desember TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp103.912.754 atau mencapai 236,30 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp43.975.000.

Realisasi Belanja Negara Per 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp25.821.165.425 atau mencapai 93,66 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp27.570.346.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset Per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp182.764.572.690 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp119.255.792; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp93.559.210.281; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp89.086.106.617.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp420.290.223 dan Rp182.344.282.467.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp44.334.675, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp15.722.403.083 sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai Rp15.678.068.408. Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp6.547.648.405 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp22.225.716.813.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp178.318.807.428, ditambah Defisit-LO sebesar Rp22.225.716.813, ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp533.939.181 dan transaksi antar entitas senilai total Rp25.717.252.671, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp182.344.282.467.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	43,975,000	103,912,754	236.30	68,727,260
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	2,418,526,000	2,401,451,668	99.29	2,337,257,787
Belanja Barang	B.4	12,520,857,000	11,079,531,257	88.49	12,208,176,892
Belanja Modal	B.5	12,630,963,000	12,340,182,500	97.70	7,127,134,330
JUMLAH BELANJA		27,570,346,000	25,821,165,425	93.66	21,672,569,009

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NERACA

Per 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam.Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak (NETO)	C.2	-	-
Persediaan	C.3	119,255,792	55,661,466
Jumlah Aset Lancar		119,255,792	55,661,466
ASET TETAP			
Tanah	C.4	54,816,312,000	54,816,312,000
Peralatan dan Mesin	C.5	85,005,463,732	88,412,715,807
Gedung dan Bangunan	C.6	26,530,689,330	26,558,738,330
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.7	12,795,916,887	12,795,916,887
Aset Tetap Lainnya	C.8	154,299,610	154,299,610
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.9	7,620,133,183	-
Akumulasi Penyusutan	C.10	(93,363,604,461)	(93,777,285,994)
Jumlah Aset Tetap		93,559,210,281	88,960,696,640
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.11	85,037,405,144	85,105,764,384
Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan	C.12	37,132,950	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.13	7,013,620,000	-
Aset Lain-Lain	C.14	4,307,000	6,275,753,697
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.15	(3,006,358,477)	(2,079,068,759)
Jumlah Aset Lainnya		89,086,106,617	89,302,449,322
JUMLAH ASET		182,764,572,690	178,318,807,428
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.16	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.17	420,290,223	-
Utang yang belum Ditagihkan	C.18	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		420,290,223	-
JUMLAH KEWAJIBAN		420,290,223	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.19	182,344,282,467	178,318,807,428
JUMLAH EKUITAS		182,344,282,467	178,318,807,428
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		182,764,572,690	178,318,807,428

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Pendapatan PNBP Lainnya		44,334,675	57,527,260
Pendapatan Badan Layanan umum		-	-
JUMLAH PENDAPATAN		44,334,675	57,527,260
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2,401,451,668	2,337,257,787
Beban Persediaan	D.3	102,002,986	157,841,050
Beban Barang dan Jasa	D.4	4,853,233,268	4,736,398,469
Beban Pemeliharaan	D.5	1,599,655,460	6,425,168,083
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,345,976,293	718,186,399
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	5,420,083,408	4,000,942,250
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		15,722,403,083	18,375,794,038
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(15,678,068,408)	(18,318,266,778)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset		(6,549,097,720)	(11,319,716)
Pendapatan Pelepasan Aset		58,128,764	11,200,000
Beban Pelepasan Aset		6,607,226,484	22,519,716
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1,449,315	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1,449,315	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(6,547,648,405)	(11,319,716)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(22,225,716,813)	(18,329,586,494)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(22,225,716,813)	(18,329,586,494)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	178,318,807,428	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(22,225,716,813)	(18,329,586,494)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	533,939,181	(401,533,318)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.2	(2,465,513)	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4	536,404,694	(401,533,318)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	-
JUMLAH		533,939,181	(401,533,318)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	25,717,252,671	197,049,927,240
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	4,025,475,039	178,318,807,428
EKUITAS AKHIR	E.6	182,344,282,467	178,318,807,428

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dasar Hukum Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Entitas berkedudukan di Jalan Seacorm KM. 2, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali.

Entitas dan Rencana Strategis

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas dan fungsi di bidang data dan informasi kelautan dan perikanan. Balai Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memiliki tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan survei data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan verifikasi, validasi, dan analisis data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
4. Penyebarluasan dan pendokumentasian data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
5. Pemberian dukungan administrasi.

Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

**Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki SDM sebanyak 46 orang, yang terdiri dari 12 orang PNS, 3 orang PPPK dan 31 orang non PNS dengan Tingkat Pendidikan dan disiplin ilmu yang beragam. Secara rinci komposisi pegawai Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada table dibawah ini :

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR		JUMLAH
1	Doktoral	S3	3
2	Master	S2	4
3	Sarjana	S1	22
4	≤Sekolah Menengah Atas	≤SMA	17
JUMLAH			46 orang

PNS Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 12 orang dipetakan berdasarkan jabatan masing-masing, yang terbagi menjadi Pejabat Struktural 1 orang, Pejabat Fungsional 9 orang dan pelaksana 2 orang.

**Kegiatan Perjalinan Kerjasama Balai Pengelolaan
Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Sampai dengan 31 Desember tahun 2024 Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memiliki 1 Perjanjian Kerja Sama (PKS), yaitu PKS antara Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang pengembangan informasi potensi penangkapan ikan guna pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara secara optimal melalui pengembangan informasi potensi penangkapan ikan untuk Pembangunan sumber daya

kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan MonSAKTI. Sistem SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan Tingkat satker mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada satker telah sepenuhnya menggunakan SAKTI kelompok Pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta modul GLP).

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah

dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa

Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan antisipasi terhadap perubahan kondisi prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga dan meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Sampai dengan semester I tahun 2024 Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah dilakukan pengajuan revisi sebanyak 6 kali yaitu :

1. Revisi POK 1 terkait revisi pemuktahiran data petunjuk operasional kegiatan tanggal 12 Januari 2024;
2. Revisi POK 2 pada tanggal 23 Januari 2024 merupakan revisi perubahan catatan halaman IV DIPA pemblokiran alokasi anggaran automatic adjustmen dan perubahan rencana penarikan dana;
3. Revisi POK 3 pada tanggal 16 Februari 2024 merupakan revisi penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA;
4. Revisi POK 4 pada tanggal 3 April 2024 merupakan revisi penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA;
5. Revisi POK 4 pada tanggal 30 Mei 2024 merupakan revisi penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA;
6. Revisi DIPA pada tanggal 3 Juni 2024 merupakan revisi penghapusan tanda blokir sehubungan dengan upgrade system antena penerima data radar terminal satelit yang terbaru pada Satker Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) sebesar Rp9.957.700.000, telah mendapatkan clearance dari Kemenkominfo, KemenpanRb dan Kemen PPN/Bappenas;
7. Revisi POK 7 pada tanggal 10 Juli 2024 merupakan revisi penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran

- dalam 1 (satu) RO dan perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA.
8. Revisi POK 8 pada tanggal 11 Oktober 2024 merupakan revisi penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA.
 9. Revisi 9 pada tanggal 31 Oktober 2024 merupakan revisi pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan belanja pegawai dengan pengurangan pagu belanja pegawai dalam DIPA, serta perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA.
 10. Revisi POK 10 pada tanggal 4 Desember 2024 merupakan revisi penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA.
 11. Revisi POK 11 pada tanggal 12 Desember 2024 merupakan revisi penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA.
 12. Revisi POK 12 pada tanggal 24 Desember 2024 merupakan revisi penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA.
 13. Revisi POK 13 pada tanggal 27 Desember 2024 merupakan revisi penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggaran dalam 1 (satu) RO dan perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	3,000,000,000	2,418,526,000
Belanja Barang	9,789,250,000	12,520,875,000
Belanja Modal	15,362,570,000	12,630,963,000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	28,151,820,000	27,570,364,000

Realisasi

Pendapatan

Rp103.912.754

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp103.912.754 atau mencapai 236,44 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp43.975.000.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari penjualan tanah, gedung, dan bangunan		5,668,000	0.00
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin		52,460,764	0.00
Pendapatan sewa tanah, gedung, bangunan	-	7,732,675	0.00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	11,000,000	-	0.00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	31,025,000	33,602,000	108.31
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan	1,200,000	-	0.00
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	750,000	3,000,000	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang ILalu		1,449,315	0.00
Jumlah	43,975,000	103,912,754	236.30

Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2024 Balai Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berasal dari :

1. Pendapatan dari penjualan tanah, gedung, dan bangunan Balai Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp5.668.000 berasal dari hasil penghapusan melalui penjualan lelang bongkaran gedung pos jaga, rumah negara, dan mes Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
2. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin Balai Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp52.460.764 berasal dari penghapusan BMN dengan penjualan Lelang peralatan dan mesin Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Pendapatan sewa tanah, Gedung, dan bangunan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp7.732.675 berasal dari sewa rumah dinas PNS balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan sebanyak 7 orang yang dipotong dengan mekanisme potongan SPM gaji induk PNS;

4. Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standarisasi lainnya Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp33.602.000 berasal dari pengujian kualitas air laboratorium kualitas perairan BPISDKP;
5. Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, dan informasi Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.000.000 berasal dari bimtek pembuatan Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur.
6. Pendapatan penerimaan Kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.449.315 berasal dari kurang volume pada pekerjaan perbaikan bangunan rumah negara.

Selanjutnya Realisasi Pendapatan untuk periode Per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 44.64%. Hal ini disebabkan pada tahun 2024, terdapat pendapatan dari penjualan tanah, gedung, dan bangunan yang berasal dari hasil penghapusan melalui penjualan lelang bongkaran gedung pos jaga, rumah negara, dan mes Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, kenaikan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar 78.65% yang berasal dari penghapusan BMN dengan penjualan Lelang peralatan dan mesin Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan kenaikan pendapatan jasa tenaga, pekerjaan dan informasi sebesar 92.50% berasal dari bimtek pembuatan Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari penjualan tanah,gedung, dan bangunan	5,668,000	-	5,668,000	100.00
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	52,460,764	11,200,000	41,260,764	78.65
Pendapatan Sew a Tanah, Gedung, dan Bangunan	7,732,675	6,872,260	860,415	11.13
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	80,000	(80,000)	#DIV/0!
Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	33,602,000	50,350,000	(16,748,000)	(49.84)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	1,449,315		1,449,315	100.00
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi	3,000,000	225,000	2,775,000	92.50
Jumlah	103,912,754	57,527,260	46,385,494	44.64

Realisasi

Belanja

Rp25.821.165.425

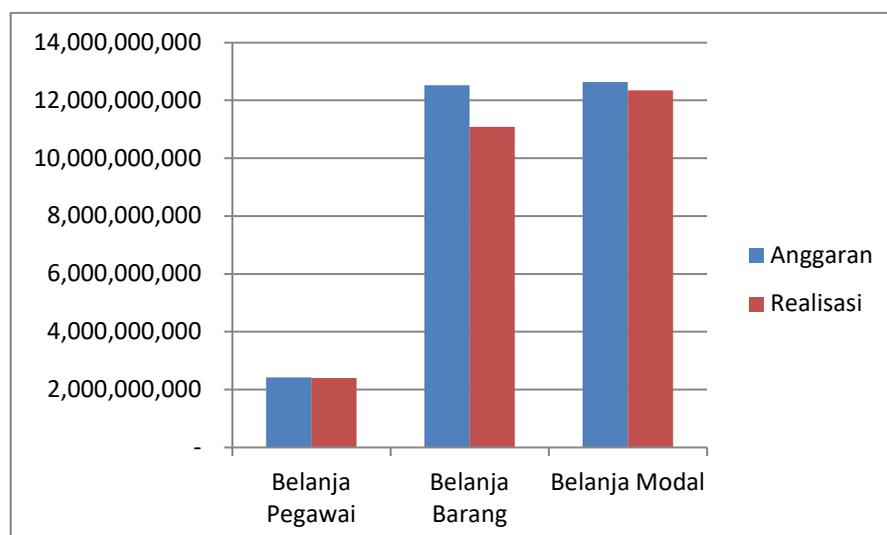
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25.821.165.425 atau 93,66% dari anggaran belanja sebesar Rp27.570.346.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2,418,526,000	2,401,821,862	99.31
Belanja Barang	12,520,857,000	11,080,574,824	88.50
Belanja Modal	12,630,963,000	12,340,182,500	97.70
Total Belanja Kotor	27,570,346,000	25,822,579,186	93.66
Pengembalian Belanja	-	(1,413,761)	
Total Belanja	27,570,346,000	25,821,165,425	93.66

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,19%. Kenaikan terjadi pada realisasi belanja pegawai sebesar 0.03% dan realisasi belanja modal sebesar 0,73%. Kenaikan realisasi belanja pegawai disebabkan terdapat penambahan jumlah pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 2 orang an. Todhi Pristiano dan Il Rahma Gesari. Kenaikan realisasi belanja modal disebabkan terdapat kenaikan belanja penambahan nilai peralatan dan mesin yang berupa penggantian sarana sistem radar terminal dari kegiatan peningkatan kapasitas sarana stasiun bumi.

Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2,401,451,668	2,337,257,787	64,193,881	0.03
Belanja Barang	11,079,531,257	12,208,176,892	(1,128,645,635)	(0.09)
Belanja Modal	12,340,182,500	7,127,134,330	5,213,048,170	0.73
Jumlah	25,821,165,425	21,672,569,009	4,148,596,416	0.19

*Belanja
Pegawai
Rp2.401.451.668*

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.401.451.668 dan Rp2.337.257.787. Realisasi belanja pegawai Per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,78% dari TA 2023. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 terdapat penambahan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 2 orang, dan terdapat kenaikan/penyesuaian besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar 8 persen.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	712,650,600	810,448,200	(97,797,600)	(13.72)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,611	10,112	499	4.70
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	49,302,940	54,290,450	(4,987,510)	(10.12)
Belanja Tunj. Anak PNS	19,721,176	20,705,024	(983,848)	(4.99)
Belanja Tunj. Struktural PNS	24,120,000	25,200,000	(1,080,000)	(4.48)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	48,978,000	50,532,000	(1,554,000)	(3.17)
Belanja Tunj. PPh PNS	5,107,072	940,550	4,166,522	81.58
Belanja Tunj. Beras PNS	40,989,720	49,173,180	(8,183,460)	(19.96)
Belanja Uang Makan PNS	91,369,000	117,108,000	(25,739,000)	(28.17)
Belanja Tunjangan Umum PNS	16,905,000	18,175,000	(1,270,000)	(7.51)
Belanja Gaji Pokok PPPK	121,736,800	5,933,000	115,803,800	95.13
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,477	192	2,285	92.25
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,844,320	0	3,844,320	100.00
Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,537,728	0	1,537,728	100.00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14,040,000	1,080,000	12,960,000	92.31
Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,359,080	144,840	5,214,240	97.30
Belanja Uang Makan PPPK	18,500,000	1,332,000	17,168,000	92.80
Belanja Uang Lembur	14,059,000	14,843,000	(784,000)	(5.58)
Belanja Uang Lembur PPPK	979,000	0	979,000	100.00
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja	1,042,963,942	1,157,692,857	(114,728,915)	(11.00)
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	169,645,396	9,649,816	159,995,580	94.31
Jumlah Belanja Kotor	2,401,821,862	2,337,258,221	64,563,641	2.69
Pengembalian Belanja Pegawai	(370,194)	(434)	369,760	(99.88)
Jumlah Belanja	2,401,451,668	2,337,257,787	64,933,401	2.70

Belanja Barang

B.4 Belanja Barang

Rp11.079.531.257

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.079.531.257 dan Rp12.208.176.892. Realisasi belanja barang Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengalami penurunan sebesar 10.18% dari realisasi tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1,851,888,634	1,900,491,471	(48,602,837)	(2.62)
Belanja Barang Non Operasional	178,287,081	83,650,355	94,636,726	53.08
Belanja Barang Persediaan	141,301,552	387,458,386	(246,156,834)	(174.21)
Belanja Jasa	2,870,033,463	2,867,178,068	2,855,395	0.10
Belanja Pemeliharaan	4,693,087,801	6,251,212,213	(1,558,124,412)	(33.20)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,345,976,293	718,186,399	627,789,894	46.64
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-	# DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	11,080,574,824	12,208,176,892	(1,127,602,068)	(10.18)
Pengembalian Belanja	(1,043,567)	-	-	-
Jumlah Belanja	11,079,531,257	12,208,176,892	(1,127,602,068)	(10.18)

Belanja Modal

B.5 Belanja Modal

Rp12.340.182.500

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp12.340.182.500 dan Rp7.127.134.330. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Per 31 Desember 2024 Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengalami kenaikan sebesar 42,24% dibandingkan TA 2023. Terdapat kenaikan belanja modal peralatan dan mesin sebesar 86.62% dibandingkan dengan tahun 2023. Belanja modal peralatan dan mesin Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berupa pengadaan panel digital interaktif kegiatan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi BPISDKP, pengadaan peralatan perkantoran BPISDKP berupa fume hood with acid storage, oven, spektrofotometer, dan alat fitness indoor, dan penggantian sarana system radar terminal kegiatan peningkatan kapasitas sarana stasiun bumi sebesar

Rp10.518.861.000

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,597,523,500	1,551,406,900	10,046,116,600	86.62
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	443,194,475	(443,194,475)	#DIV/0!
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal jalan, irigasi dan Jaringan	0	142,310,000	(142,310,000)	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	742,659,000	4,990,222,955	(4,247,563,955)	(571.94)
Jumlah Belanja Kotor	12,340,182,500	7,127,134,330	5,213,048,170	42.24
Pengembalian	-	-	-	#VALUE!
Jumlah Belanja	12,340,182,500	7,127,134,330	5,213,048,170	42.24

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.597.523.500 dan Rp1.551.406.900. Belanja modal peralatan dan mesin Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berupa pengadaan panel digital interaktif kegiatan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi BPISDKP sebesar Rp294.000.000, pengadaan peralatan perkantoran BPISDKP berupa fume hood with acid storage, oven, spektrofotometer, dan alat fitness indoor sebesar Rp784.662.500, dan penggantian sarana system radar terminal kegiatan peningkatan kapasitas sarana stasiun bumi sebesar Rp10.518.861.000.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.597.523,500	1.551.406,900	10.046.116,600	86.62
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan	0	0	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	11.597.523,500	1.551.406,900	10.046.116,600	86.62
Pengembalian	0	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	11.597.523,500	1.551.406,900	10.046.116,600	86.62

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Per 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp443.194.475

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2024	T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	443.194,475	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	443.194,475	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	443.194,475	0.00

B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp742.659.000 dan Rp4.990.222.955. Belanja modal lainnya Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan citra satelit radar kegiatan pengadaan sarana data citra satelit radar.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

*Piutang Bukan
Pajak Rp0*

C.2 Piutang Bukan Pajak

Piutang bukan pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0. dan Rp0.

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0*

C.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0. dan Rp0.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.4 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Persediaan
Rp119.255.792*

C.5 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan TA 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp119.255.792 dan Rp55.661.466 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

Persediaan	TH 2024	TH 2023	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN (%)
Barang Konsumsi	43,690,402	31,641,466	12,048,936	27.58
Bahan Baku	75,565,390	24,020,000	51,545,390	68.21
Jumlah	119,255,792	55,661,466	63,594,326	53.33

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp54.816.312.000

C.6 Tanah

Tanah yang dimiliki Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp54.816.312.000 dan Rp Rp54.816.312.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	-
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp	-

Peralatan dan

Mesin

Rp85.005.463.732

C.7 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp85.005.463.732 dan Rp88.412.715.807. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	88,412,715,807
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	1,078,662,500
Koreksi Pencatatan Nilai bertambah	Rp	24,775,500
Transfer Masuk	Rp	-
Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap	Rp	39,050,000
Perolehan Lainnya	Rp	151,332,341
Mutasi kurang:		
Transfer Keluar	Rp	587,633,038
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	4,113,439,378
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	Rp	-
Koreksi Pencatatan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	85,005,463,732
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	Rp	82,983,016,123
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp	2,022,447,609

Mutasi tambah:

1. Pencatatan atas pembelian Pompa Sumersible dengan nilai perolehan Rp46.332.341 dari kegiatan Perbaikan Tanggul Pengaman Banjir yang menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (523119) berdasar Surat Keterangan Koreksi Pencatatan nomor B.2149/BPISDKP/PL.760/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024
2. Pencatatan atas Pengadaan Fume Hood/Lemari Asam Kode Paket e-Purchasing : AL2-P2402-8473264 OLEH PT. Robust Multilab Solusindo berdasarkan Surat Pesanan nomor 004/SP.BPISDKP/PPK-2/I/2024 tanggal 2 Februari 2024 dan berita acara serah terima barang nomor BAST.004/PPK.2/BPISDKP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 sejumlah 1 Unit senilai Rp38.000.000.
3. Pencatatan atas Pengadaan Panel Digital Interaktif OLEH PT. SIGIN INTERACTIVE INDONESIA berdasarkan Surat Pesanan nomor 020/SP.BPISDKP/PPK-2/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 dan berita acara serah terima barang nomor BAST.020/PPK.2/BPISDKP/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 sejumlah 2 Unit senilai Rp294.000.000

4. Perolehan Lainnya Alat Kantor & Rumah Tangga merupakan pencatatan atas pembelian Kulkas A.c Split, Kompor Gas, Televisi dengan nilai perolehan Rp56.000.000 dari kegiatan Pembelian peralatan rumah negara dan mess BPISDKP yang menggunakan akun Belanja Barang Operasional Lainnya (521119) berdasar Surat Keterangan Koreksi Pencatatan nomor B.2149/BPISDKP/PL.760/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024
5. Pencatatan atas Pengadaan Fume Hood/Lemari Asam Kode Paket e-Purchasing : AL2-P2402-8473264 OLEH PT. Robust Multilab Solusindo berdasarkan Surat Pesanan nomor 004/SP.BPISDKP/PPK-2/I/2024 tanggal 2 Februari 2024 dan berita acara serah terima barang nomor BAST.004/PPK.2/BPISDKP/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 sejumlah 1 Unit senilai Rp160.000.000.
6. Pencatatan atas Pengadaan Oven Laboratorium Kode Paket e-Purchasing : ALE-P2402-8472365 OLEH CV. Manna Mulia berdasarkan Surat Pesanan nomor 005/SP.BPISDKP/PPK-2/I/2024 tanggal 2 Februari 2024 dan berita acara serah terima barang nomor BAST.005/PPK.2/BPISDKP/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 sejumlah 2 Unit senilai Rp74.000.000.
7. Pencatatan atas Pengadaan Spektrophotometer Kode Paket e-Purchasing : ALE-P2401-8433122 OLEH PT. Detik Jaya berdasarkan Surat Pesanan nomor 003/SP.BPISDKP/PPK-2/I/2024 tanggal 1 Februari 2024 dan berita acara serah terima barang nomor BAST.003/PPK.2/BPISDKP/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 sejumlah 1 Unit senilai Rp283.000.000
8. Perolehan Lainnya Alat Laboratorium merupakan pencatatan atas pembelian UPS APC SMC1000I Smart-UPS-1000 dengan nilai perolehan Rp49.000.000 dari kegiatan Operasional Jaringan Listrik yang menggunakan akun Belanja Barang Operasional Lainnya (521119) berdasar Surat

Keterangan Koreksi Pencatatan nomor B.2149/BPISDKP/PL.760/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024

9. Reklasifikasi Dari aset Lainnya Ke Aset Tetap Alat Laboratorium merupakan pencatatan atas penggunaan kembali BBM yang telah dihentikan penggunaannya dalam operasional berdasar surat keterangan penggunaan kembali barang milik negara nomor B.1293/BPISDKP/PL.110/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024.
10. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Alat Laboratorium pencatatan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jendral berdasarkan surat tugas nomor B.4400.1/ITJ.1/KP.440/V/2024 tanggal 22 Mei 2024. Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023, mengadakan belanja persediaan bahan baku analisis berupa anak timbang kalibrasi merk Crown sebanyak 1 (satu) set senilai Rp24.775.500. Kode akun yang digunakan untuk belanja tersebut seharusnya merupakan belanja Penambahan Nilai Peralatan dan mesin (532121), Namun menggunakan akun Belanja Persediaan Barang Konsumsi (52181 1), serta belum tercatat sebagai BMN. Atas permasalahan tersebut diatas, maka perlu dilakukan transaksi reklasifikasi koreksi penambahan nilai kode barang BMN menjadi kode barang Timbangan/Neraca 3080111023 agar sesuai dengan yang seharusnya berdasarkan surat keterangan koreksi pencatatan nomor B.837.BPISDKP/PL.760/VI/2024 tanggal 6 Juni 2023
11. Pencatatan atas Pengadaan Alat Fitnes Pegawai BPISDKP oleh CV. Krisna Global Sarana berdasarkan Surat Pesanan nomor 007/SP.BPISDKP/PPK-2/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dan berita acara serah terima barang nomor BAST.007/PPK.2/BPISDKP/IV/2024 tanggal 28 April 2024 sejumlah 15 Unit senilai Rp235.062.500.

Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin :

1. Mutasi kurang alat besar merupakan pencatatan atas serah terima barang dari Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya kelautan dan Perikanan ke Poltek KP Jembrana berdasar berita acara serah terima barang nomor B.427/BPISDKP/PL.730/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 sejumlah 5 Unit senilai Rp164.597.258.
2. Penghentiaan Aset Dari Penggunaan alat besar merupakan pencatatan atas aset kondisi rusak berat yang dihentikan penggunaannya sebesar 1 unit senilai Rp82.500.000 berdasarkan berita acara penghentian aset nomor B.1222/BPISDKP/PL.760/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024. Sampai dengan periode laporan ini sudah terbit Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 1262/KEPMEN-KP/PL.750/XI/2024 tanggal 22 Nopember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Pencatatan atas serah terima barang alat besar dari Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya kelautan dan Perikanan ke Poltek KP Jembrana berdasar berita acara serah terima barang nomor B.427/BPISDKP/PL.730/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 sejumlah 1 Unit senilai Rp207.680.000.
4. Pencatatan atas serah terima barang alat angkut dari Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya kelautan dan Perikanan ke Poltek KP Jembrana berdasar berita acara serah terima barang nomor B.427/BPISDKP/PL.730/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 sejumlah 1 Unit senilai Rp1.877.750.
5. Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Alat Bengkel dan Alat Ukur merupakan pencatatan atas aset kondisi rusak berat yang dihentikan penggunaannya sebesar 10 unit Global Positioning System senilai Rp49.258.000 berdasarkan berita acara penghentian aset nomor B.1222/BPISDKP/PL.760/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024. Sampai dengan periode laporan ini sudah terbit Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia nomor 1262/KEPMEN-KP/PL.750/XI/2024 tanggal 22 Nopember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

6. Pencatatan atas serah terima barang alat pengolahan dari Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya kelautan dan Perikanan ke Poltek KP Jembrana berdasar berita acara serah terima barang nomor B.427/BPISDKP/PL.730/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 sejumlah 7 Unit senilai Rp48.840.000.
7. Penghentian Aset Dari Penggunaan Alat Pengolahan merupakan pencatatan atas aset kondisi rusak berat yang dihentikan penggunaannya sebesar 2 unit Lemari Penyimpan senilai Rp6.468.000 berdasarkan berita acara penghentian aset nomor B.1222/BPISDKP/PL.760/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024. Sampai dengan periode laporan ini sudah terbit Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 1262/KEPMEN-KP/PL.750/XI/2024 tanggal 22 Nopember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
8. Pencatatan atas serah terima barang dari Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya kelautan dan Perikanan ke Poltek KP Jembrana berdasar berita acara serah terima barang nomor B.427/BPISDKP/PL.730/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 sejumlah 48 Unit senilai Rp60.215.450
9. Penghentian Aset Dari Penggunaan Alat Kantor dan Rumah Tangga merupakan pencatatan atas aset kondisi rusak berat yang dihentikan penggunaannya terdiri dari aset intrakomptabel sebesar 189 unit senilai Rp352.588.995 dan aset ekstrakomptabel sebesar 44 unit senilai Rp7.994.150 berdasarkan berita acara penghentian aset nomor B.1222/BPISDKP/PL.760/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024. Sampai dengan periode laporan ini sudah terbit Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia nomor 1262/KEPMEN-KP/PL.750/XI/2024 tanggal 22 Nopember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

10. Penghentian Aset Dari Penggunaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dengan rincian sebagai berikut :

- Pencatatan atas aset kondisi rusak berat yang dihentikan penggunaannya terdiri dari aset intrakomptabel sebesar 27 unit senilai Rp104.494.394 berdasarkan berita acara penghentian aset nomor B.1222/BPISDKP/PL.760/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024. Sampai dengan periode laporan ini sudah terbit Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 1262/KEPMEN-KP/PL.750/XI/2024 tanggal 22 Nopember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Pencatatan atas aset kondisi rusak berat yang dihentikan penggunaannya terdiri dari aset intrakomptabel sebesar 2 unit senilai Rp2.229.758.500 berdasarkan berita acara penghentian aset nomor B.1331/BPISDKP/PL.760/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024. Sampai dengan periode laporan ini sudah diusulkan permohonan penerbitan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat usulan nomor B.2158/BPISDKP/PL.750/XII/2024 Tanggal 27 Desember 2024

11. Alat Kedokteran dan Kesehatan merupakan pencatatan atas aset kondisi rusak berat yang dihentikan penggunaannya terdiri dari aset intrakomptabel sebesar 13 unit senilai Rp13.987.850 berdasarkan berita acara penghentian aset nomor B.1222/BPISDKP/PL.760/VIII/2024 tanggal 5 Agustus

2024. Sampai dengan periode laporan ini sudah terbit Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 1262/KEPMEN-KP/PL.750/XI/2024 tanggal 22 Nopember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
12. Pencatatan atas serah terima barang dari Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya kelautan dan Perikanan ke Poltek KP Jembrana berdasar berita acara serah terima barang nomor B.427/BPISDKP/PL.730/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 sejumlah 48 Unit senilai Rp60.215.450
 13. Mutasi kurang Alat Laboratorium merupakan pencatatan atas aset kondisi rusak berat yang dihentikan penggunaannya terdiri dari aset intrakomptabel sebesar 60 unit senilai Rp299.823.880 berdasarkan berita acara penghentian aset nomor B.1222/BPISDKP/PL.760/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024. Sampai dengan periode laporan ini sudah terbit Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 1262/KEPMEN-KP/PL.750/XI/2024 tanggal 22 Nopember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 14. Mutasi kurang komputer merupakan pencatatan atas aset kondisi rusak berat yang dihentikan penggunaannya terdiri dari aset intrakomptabel sebesar 61 unit senilai Rp355.779.017 berdasarkan berita acara penghentian aset nomor B.1222/BPISDKP/PL.760/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024. Sampai dengan periode laporan ini sudah terbit Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 1262/KEPMEN-KP/PL.750/XI/2024 tanggal 22 Nopember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 15. Mutasi kurang komputer Pencatatan atas aset kondisi rusak berat yang dihentikan penggunaannya terdiri dari

aset intrakomptabel sebesar 2 unit senilai Rp538.210.000 berdasarkan berita acara penghentian aset nomor B.1331/BPISDKP/PL.760/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024. Sampai dengan periode laporan ini sudah diusulkan permohonan penerbitan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat usulan nomor B.2158/BPISDKP/PL.750/XII/2024 Tanggal 27 Desember 2024

16. Mutasi kurang Alat Eksplorasi merupakan pencatatan atas aset kondisi rusak berat yang dihentikan penggunaannya terdiri dari aset intrakomptabel sebesar 10 unit senilai Rp3.850.000 berdasarkan berita acara penghentian aset nomor B.1222/BPISDKP/PL.760/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024. Sampai dengan periode laporan ini sudah terbit Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 1262/KEPMEN-KP/PL.750/XI/2024 tanggal 22 Nopember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
17. Mutasi kurang Peralatan dan Keselamatan Kerja pencatatan atas serah terima barang dari Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya kelautan dan Perikanan ke Poltek KP Jembrana berdasar berita acara serah terima barang nomor B.427/BPISDKP/PL.730/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 sejumlah 48 Unit senilai Rp60.215.450
18. Mutasi kurang Peralatan dan Keselamatan Kerja pencatatan atas serah terima barang dari Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya kelautan dan Perikanan ke Poltek KP Jembrana berdasar berita acara serah terima barang nomor B.427/BPISDKP/PL.730/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 sejumlah 1 Unit senilai Rp3.960.742

Gedung dan Bangunan
Rp26.530.689.330

C.8 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan TA 2024 dan 2023 adalah Rp26.530.689.330 dan Rp26.558.738.330.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	26,558,738,330
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	28,049,000
Saldo per 31 Desember 2024	26,530,689,330
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	3,871,952,838
Nilai Buku per 31 Desember 2024	30,402,642,168

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp12.795.916.887

C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.759.916.887 dan Rp12.759.916.887 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	12,795,916,887
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2024	12,795,916,887
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	6,508,635,500
Nilai Buku per 31 Desember 2024	19,304,552,387

Aset Tetap Lainnya
Rp154.299.610

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 adalah Rp154.299.610 dan Rp154.299.610.

Saldo per 31 Desember 2023	154,299,610
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 30 September 2024	154,299,610
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2024	-
Nilai Buku per 30 September 2024	154,299,610

<p><i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i> Rp7.620.133.183</p>	<p>C.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.620.133.183 dan Rp0.</p>
<p><i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i> Rp(93.363.604.461)</p>	<p>C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp(93.363.604.461) dan Rp(93.777.285.994). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).</p>
<p><i>Aset Tak Berwujud</i> Rp85.037.405.144</p>	<p>C.13 Aset Tak Berwujud Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) TA 2024 dan 2023 adalah Rp85.037.405.144 dan Rp85.105.764.384. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.</p>
<p><i>Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan</i> Rp37.132.950</p>	<p>C.14 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Nilai perolehan Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan TA 2024 dan 2023 adalah Rp37.132.950 dan Rp0. Aset tak berwujud dalam pengerjaan merupakan pengadaan citra satelit radar.</p>
<p><i>Dana yang Dibatasi Penggunaannya</i> Rp7.013.620.000</p>	<p>C.15 Dana yang Dibatasi Penggunaannya Dana yang dibatasi penggunaannya pada TA 2024 dan 2023 adalah Rp7.013.620.000 dan Rp0. Dana yang dibatasi penggunaannya pada TA 2024 merupakan dana di rekening penampungan untuk pekerjaan tahun 2024 yang akan diselesaikan pada tahun 2025 yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aset peralatan dan mesin dalam pengerjaan senilai Rp3.047.100.000. - Penggantian system radar terminal senilai Rp3.223.861.000. - Pengadaan citra satelit radar senilai Rp742.659.000.

<p><i>Aset Lain-Lain</i> Rp4.307.000</p>	<p>C.16 Aset Lain-Lain Aset Lain-lain TA 2024 dan 2023 adalah Rp4.307.000 dan Rp6.275.753.697. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta dalam proses penghapusan dari BMN.</p>
<p><i>Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya</i> Rp(3.006.358.477)</p>	<p>C.17 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(3.006.358.477) dan Rp(2.079.068.759).</p>
<p><i>Uang Muka dari KPPN</i> Rp0.</p>	<p>C.18 Uang Muka dari KPPN Uang Muka dari KPPN TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.</p>
<p><i>Utang kepada Pihak Ketiga</i> Rp420.290.223</p>	<p>C.19 Utang kepada Pihak Ketiga Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp420.290.223 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada pihak ketiga Balai Pengelolaan dan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 31 Desember 2024 merupakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian RPATA dengan kontrak Nomor 001/SP.BPISDKP/PPK-1/VII/2024 untuk pekerjaan citra satelit radar dan penggantian sistem radar terminal. 2. Langganan daya dan jasa yang berupa langganan listrik dan telepon bulan Desember 2024. <p>Adapun rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:</p>

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2024

No SP2D	Tanggal SP2D	No SPM	Tanggal SPM	Uraian	Belanja	Nilai
241320301000057	23-12-2024	004407/632004/2024	20-12-2024	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 001/SP.BPISDKP/FPK-1/VI/2024 untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Sarana Sistem Radar Terminal dan Pengadaan Data Citra Satelit Radar	53	37,132,950
241320301000055	23-12-2024	004387/632004/2024	20-12-2024	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor 001/SP.BPISDKP/FPK-1/VI/2024 untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Sarana Sistem Radar Terminal dan Pengadaan Data Citra Satelit Radar	53	325,133,183
				PLN	52	463,972
				PLN	52	1,121,690
				PLN	52	55,820,824
				TELKOM	52	31,857
				TELKOM	52	31,857
				TELKOM	52	31,857
				TELKOM	52	31,857
				TELKOM	52	31,857
				TELKOM	52	31,857
				TELKOM	52	31,857
				TELKOM	52	31,857
				TELKOM	52	31,857
				TELKOM	52	53,391
				TELKOM	52	277,500
				JUMLAH		420,290,223

Ekuitas

Rp182.764.572.690

C.19 Ekuitas

Ekuitas TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp182.764.572.690 dan Rp178.318.807.428. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP
Rp44.334.675*

D.1 Pendapatan

Jumlah Pendapatan pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk periode TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp44.334.675 dan Rp57.527.260 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	%NAIK (TRN)
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan	7,732,675	6,872,260	112.52
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi		80,000	0.00
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-	-	-
Jumlah Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha	7,732,675	6,952,260	111.23
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum			
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	33,602,000	50,350,000	66.74
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Lalu	-	-	-
Jumlah Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	33,602,000	50,350,000	66.74
Pendapatan Jasa Lainnya			
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	3,000,000	225,000	1,333.33
Jumlah Pendapatan Jasa Lainnya	3,000,000	225,000	1,333.33
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	44,334,675	57,527,260	77.07
Jumlah	44,334,675	57,527,260	77.07

1. Pendapatan sewa tanah, Gedung, dan bangunan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp7.732.675 berasal dari sewa rumah dinas PNS balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 6 orang yang dipotong dengan mekanisme potongan SPM gaji induk PNS;
2. Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp33.602.000 berasal dari pengujian kualitas air laboratorium kualitas perairan BPISDKP;

3. Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, dan informasi Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.000.000 berasal dari bimtek pembuatan Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur

Beban Pegawai **D.2 Beban Pegawai**

Rp2.401.451.668

Beban Pegawai untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.401.451.668 dan Rp2.337.257.787 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	712,650,600	810,448,200	(97,797,600)	(13.72)
Beban Pembulatan Gaji PNS	10,417	9,678	739	7.09
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	49,302,940	54,290,450	(4,987,510)	(10.12)
Beban Tunj. Anak PNS	19,721,176	20,705,024	(983,848)	(4.99)
Beban Tunj. Struktural PNS	24,120,000	25,200,000	(1,080,000)	(4.48)
Beban Tunj. Fungsional PNS	48,978,000	50,532,000	(1,554,000)	(3.17)
Beban Tunj. PPh PNS	5,107,072	940,550	4,166,522	81.58
Beban Tunj. Beras PNS	40,989,720	49,173,180	(8,183,460)	(19.96)
Beban Uang Makan PNS	91,369,000	117,108,000	(25,739,000)	(28.17)
Beban Tunjangan Umum PNS	16,535,000	18,175,000	(1,640,000)	(9.92)
Beban Gaji Pokok PPPK	121,736,800	5,933,000	115,803,800	95.13
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,477	192	2,285	92.25
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,844,320		3,844,320	100.00
Beban Tunjangan Anak PPPK	1,537,728		1,537,728	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	14,040,000	1,080,000	12,960,000	92.31
Beban Tunjangan Beras PPPK	5,359,080	144,840	5,214,240	97.30
Beban Uang Makan PPPK	18,500,000	1,332,000	17,168,000	92.80
Beban Uang Lembur PPPK	979,000		979,000	100.00
Beban Uang Lembur	14,059,000	14,843,000	(784,000)	(5.58)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1,042,963,942	1,157,692,857	(114,728,915)	(11.00)
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	169,645,396	9,649,816	159,995,580	94.31
Jumlah	2,401,451,668	2,337,257,787	64,193,881	2.67

Beban
Persediaan
Rp102.002.986

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp102.002.986 dan Rp157.841.050 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	32,727,116	92,254,550	(59,527,434)	(181.89)
Beban Persediaan Bahan Baku	69,275,870	65,586,500	3,689,370	5.33
Jumlah Beban Persediaan	102,002,986	157,841,050	(55,838,064)	(54.74)

Beban persediaan konsumsi Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan per September 2024 sebesar Rp32.727.116 berupa Alat Tulis Kantor (ATK), dan komputer suplay, sedangkan beban persediaan bahan baku Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp69.275.870 berupa bahan penunjang laboratorium dan bahan kimia laboratorium.

Beban Barang
dan Jasa
Rp4.853.233.268

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.853.233.268 dan Rp4.736.398.469 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa

TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1,520,701,415	1,697,510,761	(176,809,346)	-11.63
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	21,095,500	31,682,980	(10,587,480)	-50.19
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	49,700	888,260	(838,560)	-1687.24
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	86,766,000	128,760,000	(41,994,000)	-48.40
Beban Barang Operasional Lainnya	118,276,019	40,034,000	78,242,019	66.15
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1615,470	(1615,470)	#DIV/0!
Beban Bahan	3,600,000	65,650,355	(62,050,355)	-1723.62
Beban Barang Non Operasional Lainnya	174,687,081	18,000,000	156,687,081	89.70
Beban Langganan Listrik	797,792,115	868,609,608	(70,817,493)	-8.88
Beban Langganan Telepon	10,663,809	7,334,282	3,329,527	31.22
Beban Langganan Air	125,128,000	94,395,000	30,733,000	24.56
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,033,370,913	973,352,958	60,017,955	5.81
Beban Jasa Konsultan	64,269,000			
Beban Sewa	218,760,000	197,115,000	21,645,000	9.89
Beban Jasa Profesi	9,500,000	2,700,000	6,800,000	71.58
Beban Jasa Lainnya	668,573,716	608,749,795	59,823,921	8.95
Jumlah	4,853,233,268	4,736,398,469	52,565,799	1.08

Beban Pemeliharaan
Rp1.599.655.460

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.599.655.460 dan Rp6.425.168.083 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	650,606,830	1,346,143,950	(695,537,120)	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	88,037,659	29,067,000	58,970,659	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	693,078,871	4,169,267,073	(3,476,188,202)	100.00
Beban Pemeliharaan Jalan, dan Jembatan	20,163,000	263,977,000	(243,814,000)	100.00
Beban Pemeliharaan Irigasi	18,924,000	118,643,000	(99,719,000)	100.00
Beban Pemeliharaan Jaringan	128,845,100	324,114,190	(195,269,090)	100.00
Beban Persediaan Suku Cadang		173,955,870		
Jumlah	1,599,655,460	6,425,168,083	(4,651,556,753)	100.00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp1.345.976.293

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.345.976.293 dan Rp718.186.399 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK/TURUN	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1,325,256,293	694,986,399	630,269,894	100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20,720,000	23,200,000	(2,480,000)	100.00
Jumlah	1,345,976,293	718,186,399	627,789,894	100.00

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp5.420.083.408

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.420.083.408 dan Rp4.000.942.250

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Kegiatan Non Operasional Rp(6.547.648.405)

D.11. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(6.547.648.405) dan Rp(11.319.716).

Pos Luar Biasa Rp0

D.12. POS LUAR BIASA

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp178.318.807.428</i>	E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp178.318.807.428 dan Rp0.
<i>Defisit LO</i> <i>Rp22.225.716.813</i>	E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode TA 2024 dan 2023 adalah defisit sebesar Rp22.225.716.813 dan Rp18.329.586.494.
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar</i> <i>Rp0</i>	E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode TA 2024 sebesar Rp0.
<i>Penyesuaian Nilai Aset</i> <i>Rp0</i>	E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.
<i>Koreksi Nilai Persediaan</i> <i>Rp0</i>	E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Selisih Revaluasi Aset Tetap</i> <i>Rp0</i>	E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Koreksi atas Reklasifikasi</i> <i>Rp(2.465.513)</i>	E.3.5 Koreksi Atas Reklasifikasi Koreksi atas reklasifikasi untuk periode TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(2.465.513) dan Rp0.

Koreksi Aset Non Revaluasi Rp536.404.694 **E.3.5 Koreksi Aset Non Revaluasi**
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp536.404.694 dan Rp(401.533.318). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-lain Rp0 **E.3.6 Koreksi Lain-lain**
Koreksi Lain-Lain untuk periode TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas Rp25.717.252.671 **E.4 Transaksi Antar Entitas**
Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp25.717.252.671 dan Rp197.049.927.240. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode TA 2024, DDEL sebesar (Rp103.912.754) sedangkan DKEL sebesar Rp25.821.165.425.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung TA 2024 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung TA 2024 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir
Rp182.344.282.467

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp182.344.282.467 dan Rp178.318.807.428.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 3/KPA/BPISDKP/KU.110/I/2024 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, Bendahara Penerima PNBPN, dan Anggota Pengelola PNBPN pada tanggal 2 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Nama
Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kuasa Pengguna Anggaran	Dr. Teja Arief Wibawa, S.Pt., M.Si
	Pejabat Pembuat Komitmen	Ridla Kumara Hadi, S.Kom., M.Eng
	Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM	Endah Mulyastuti, SE
	Bendahara Pengeluaran	Made Agus Dwipayana, SE
	Staf Pengelola Keuangan	Kadek Ratna Pratiwi, A.Md
	Staf Pengelola Keuangan	Ni Luh Suryantini
	Staf Pengelola Keuangan	Ni Putu Delviasari, S.Ak
	Staf Pengelola Keuangan	Ni Luh Sukiati
	Bendahara PNBPN	I Nyoman Suastawan
	Staf Pengelola PNBPN	Eko Susilo, S.Pt

- Terdapat selisih pada cetakan rekening koran senilai Rp10.400, yang disebabkan terdapat tagihan KKP senilai Rp10.400 berupa pembayaran pelunasan perjalanan dinas yang telah dibayarkan pada tanggal 01 Juli 2024.
- Terdapat saldo utang yang belum diterima tagihannya (218111) pada neraca senilai Rp3.691.000 merupakan kuitansi UP yang belum di SPM kan berupa biaya instruktur senam, pencekan poster dan setor pajak senilai Rp3.691.000.
- Berdasarkan audit kinerja BPISDKP tahun 2024, terdapat kurang volume pada pekerjaan perbaikan bangunan rumah negara type 60 no. 7 oleh penyedia CV. Arsa Jaya berdasarkan SPK nomor PL.03/SPK/PPK-01/BPISDKP/III/2023, tanggal 9 Maret 2023 sebesar Rp1.449.315. Sudah dilakukan penyetoran kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara dengan nomor NTPN 1A01A48VVESF4F72

pada tanggal 04 Juni 2024.

- Terdapat saldo tidak normal senilai Rp1.043.567, saldo tersebut merupakan pengembalian belanja barang persediaan barang konsumsi (521811) atas tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal KKP. Atas permasalahan tersebut sudah dilakukan koordinasi dengan Dit APK Kemenkeu. Akun 521811 merupakan akun yang tidak diperkenankan muncul pada ledger akrual, oleh karena itu disarankan untuk melakukan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian menghilangkan saldo tidak normal sudah dilakukan per tanggal 31 Desember 2024 pada aplikasi SAKTI.
- Berdasarkan audit kinerja BPISDKP tahun 2024, terdapat kurang potong pembayaran gaji atas sewa rumah negara pada bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2023 sebesar Rp421.923 dan bulan Januari sampai dengan Mei 2024 sebesar Rp1.508.091, berdasarkan perbedaan luas bangunan, dan type rumah yang tersaji pada SIMAN dan yang tersaji pada lampiran surat penghuni rumah dinas. Selain itu terdapat perhitungan harga satuan bangunan yang digunakan belum mengacu pada harga satuan bangunan per m² gedung negara, Rumah Negara dan pagar tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jembrana Provinsi Bali nomor 156/PUPRPKP/2023, tanggal 1 Maret 2023 dan nomor 169/PUPRPKP/2024, tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan standar harga satuan tertinggi bangunan Gedung Negara Kabupaten Jembrana Tahun 2024, sehingga terdapat selisih kurang perhitungan senilai Rp1.930.014.
- Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Balai Pengelolaan Informasi dengan pagu Rp14.594.067.000 dan realisasi sebesar Rp14.590.000.000. Dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Output	Anggaran			Output		
	Pagu	Realisasi	%	Target	Capaian	%
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	11,546,300,000	11,542,900,000	99.97	51 Unit	-	4.50
OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,047,767,000	3,047,100,000	99.98	1 Unit	-	4.50
	14,594,067,000	14,590,000,000				

Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kegiatan pengadaan data citra satelit radar dan penggantian sarana system radar terminal. OM sarana data citra satelit radar merupakan maintenance system antenna penerima data radar terminal Cosmo_SkyMed.

- RO yang terdapat pada Balai Pengelolaan Informasi seluruhnya masuk ke dalam sub fungsi pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan. Realisasi RO pada BPISDKP disamakan dengan realisasi anggaran belanja. Sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi RO BPISDKP mencapai Rp25.822.579.186, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian RO	Belanja			Keluaran	
		Pagu	Realisasi	%	Target	%
1	Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	550,000,000	499,942,166	90.90	3 Layanan	100.00
2	Sarana Data Citra Satelit Radar	11,546,300,000	11,261,520,000	97.53	51 Unit	100.00
3	Layanan Perkantoran	9,870,352,000	8,539,753,383	86.52	2 Layanan	100.00
4	OMSarana Data Citra Satelit Radar	3,047,767,000	3,047,100,000	99.98	1 Unit	100.00
5	Layanan Sarana Internal	784,663,000	784,662,500	100.00	5 Unit	100.00
6	Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup	300,000,000	294,000,000	98.00	2 Unit	100.00
7	Layanan Umum	1,471,264,000	1,395,601,137	94.86	1 Layanan	100.00
		27,570,346,000	25,822,579,186	93.66		